



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM AHMADI
2. Jabatan : PELELANG AHLI MUDA KPKNL PONTIANAK
3. NHK : 111515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.380.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 480.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI , Rp. 850.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 365.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V Tahun 2014, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, KIA RIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	280.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	106.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	300.000.000
Sub Total	Rp.	5.831.500.000
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.531.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.